

ABSTRAK

AKUNTABILITAS RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

Oleh

MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menjadi perhatian nasional, termasuk di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, menjadi representasi dari persoalan ini, dengan aspirasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui dukungan kebijakan yang tepat. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD merupakan bentuk akuntabilitas legislatif dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan publik, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi, ketidakjelasan tindak lanjut atas aspirasi tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas DPRD dalam memastikan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan reses bidang pendidikan pada tahun 2022. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana DPRD menjalankan fungsi representasinya, khususnya dalam menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator akuntabilitas Hulme dan Turner (1997), meliputi legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aspirasi masyarakat telah dihimpun, seperti permintaan pembangunan fasilitas pendidikan dan evaluasi kebijakan zonasi, realisasinya masih belum optimal. Kendala utama mencakup keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan kurangnya kepekaan dalam tindak lanjut aspirasi hasil reses. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akuntabilitas DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Legitimasi, Kinerja Legislatif, Kepekaan, Keterbukaan, Aspirasi Masyarakat

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF THE RECESS ACTIVITIES OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) OF LAMPUNG PROVINCE IN THE EDUCATION SECTOR IN 2022

By

MUHAMMAD SHAFWAN ASSALAM

The low quality of education in Indonesia has become a national concern, including in Lampung Province. As the provincial capital, Bandar Lampung represents this issue, with public aspirations emphasizing the need for improved access and quality of education through appropriate policy support. Public aspirations gathered through the recess activities of the Regional House of Representatives (DPRD) serve as a form of legislative accountability in absorbing and advocating for public needs, particularly in enhancing education quality. However, the lack of clarity in the follow-up to these aspirations reflects weak DPRD accountability in ensuring policy responsiveness to societal needs. This study aims to analyze the accountability of DPRD members in Lampung Province regarding recess activities in the education sector in 2022. A qualitative approach with a case study design is employed to understand how DPRD fulfills its representative function, particularly in collecting and acting upon public aspirations. The analysis is conducted using Hulme and Turner's (1997) accountability indicators, including legitimacy, moral quality, sensitivity, transparency, resource utilization, and efficiency and effectiveness. The findings reveal that although public aspirations have been collected such as requests for the construction of educational facilities and the evaluation of zoning policies their realization remains suboptimal. The primary obstacles include budget constraints, bureaucratic barriers, and a lack of sensitivity in following up on recess generated aspirations. These findings underscore the need to enhance DPRD accountability in responding to public aspirations, particularly to support improvements in education quality in Lampung Province.

Keywords: Legitimacy, Legislative Performance, Responsivness, Openness, Community Aspirations